
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Chrisma Angellicca Rivera¹, Siti Khoirina², Dewi Silvia³

^{1,2,3}Universitas Mitra Indonesia

E-mail: angelliccar0712@gmail.com¹, sitikhoirina@umitra.ac.id²

Article History:

Received: 16 Juli 2024

Revised: 06 Agustus 2024

Accepted: 08 Agustus 2024

Keywords: *Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Management*

Abstract: *The method used in this research is quantitative descriptive where the data processing is carried out statistically and then the data used is primary data in the form of a questionnaire. The population in this study were village officials and village communities in Purwosari, Natar District and the sampling technique used a saturated sampling method with a sample size of 35 respondents consisting of 18 village officials and 17 Purwosari village residents. data testing using SPSS version 25. The results of the analysis showed that Transparency has a significant effect on the management of village funds with the acquisition of a t count of 2,915 with a significance value of 0,007 less than 0,05. Accountability had no significance effect on village fund management with a t count of 0,675 with a significance value of 0,505 greater than 0,05. Community participation has a significant effect on management of village funds with the acquisition of a t count of 3,631 with a significance value of 0,001, less than 0,05.*

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi oleh pemerintah pusat pada pemerintah teritorial diharapkan dapat meningkatkan program pembangunan yang berkeadilan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang merupakan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memiliki sembilan rencana kebutuhan, termasuk membangun Indonesia dari pinggiran, dalam hal ini perkotaan, partisipasi dan keterpaduan para kepala kota dan masyarakat sekitar sangat penting untuk mencapai kemajuan di setiap kota. Dengan cara ini, pemerintah kota dan daerah setempat harus saling mendukung, pemerintah daerah bertindak menjadi pendorong kontribusi, dan daerah setempat sebagai anggota yang berfungsi dalam berbagai upaya perbaikan kota. (Putri & Sudiana, 2021).

Persoalan mendasar yang saat ini menjadi perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan. Sampai saat ini, kemiskinan masih menjadi hambatan besar bagi kemajuan Indonesia dalam mencapai status negara maju. Untuk mencapai status negara maju, Indonesia harus melakukan upaya-upaya penting yang mengarah pada pengurangan kemiskinan, peningkatan penerimaan terhadap pelatihan dan administrasi bantuan pemerintah, meningkatkan

komunikasi dan membedakan sektor keuangan. Informasi yang diperoleh dari BPS (Badan Pengukuran Fokus) memperlihatkan jika tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan melebihi angka kemiskinan di wilayah metropolitan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan bukti eksperimen pada September 2022 yang memperlihatkan jika angka kemiskinan di wilayah suatu negara berada pada angka 12,36% atau setara dengan 14,38 juta jiwa. Sebaliknya, angka kemiskinan di wilayah metropolitan tercatat yakni 7,53% atau setara dengan 11,98 juta jiwa. Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah provinsi lebih tinggi yaitu yakni 96,36% yang memperlihatkan adanya kesenjangan angka kemiskinan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. (Shagita & Indriani, 2024).

Di masa pemerintahan saat ini, pengurus toko kota telah menjadi isu panas yang sering dibahas, karena selalu pemerintah pusat memberikan dana khusus kepada aset kota untuk membiayai kegiatan perbaikan kota. Pedoman Pengelolaan Rumah Tangga Nomor 20 Tahun 2018 mencirikan pengurus toko kota sebagai suatu rangkaian siklus yang tersusun dan terkoordinasi yang dimulai dari satu tahap kemudian berlanjut ke tahap berikutnya. Pemendagri nomor 20 tahun 2018 merupakan Pedoman Pastoral yang memuat tentang dana kota yang baru diatur dalam Pemendagri nomor 114 tahun 2014 tentang tata cara pengawasan dana kota. (Fahisa & Afriyenti, 2023).

Mengingat Peraturan No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah Provinsi, hak istimewa, wewenang dan komitmen daerah mandiri guna mengkoordinasikan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta keperluan daerah setempat menurut pedoman hukum merupakan makna kemerdekaan wilayah. Pengembangan pedoman kemandirian lokal mengharapkan kota memiliki pilihan untuk mengelola administrasi mereka dan mengelola aset yang mereka miliki dengan cara yang terkoordinasi dan produktif untuk mewujudkan kawasan kota yang sejahtera (Pahlevi et al., 2022).

Sesuai Peraturan no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi, Kota adalah kesatuan wilayah setempat yang sah dengan batas wilayah yang dapat mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan jaringan lingkungan dalam rangka pergerakan wilayah setempat, dan keistimewaan adat yang dipersepsikan dan dihargai dalam kerangka kewenangan publik. termasuk yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan Aset Kota Peruntukan (ADD), pengangkatan kepala kota (kades), dan kemajuan kota. Sejalan dengan itu, kota-kota diberikan panduan sebagai arahan khusus untuk persiapan keuangan dan para eksekutif (Andriani, 2019).

Total pembiayaan daerah pada tahun 2022 yang bisa diteruskan ke 74.961 kota di 434 daerah dan perkotaan di Indonesia ditentukan yakni 68 triliun rupiah. Daripada town store roof tahun sebelumnya, jumlah ini lebih rendah yakni Rp 4 triliun. Mulai sekitar tahun 2015, cadangan kota yang beredar berjumlah 400,1 triliun rupiah. Kerangka kota dibangun memaka9 cadangan kota, antara lain jalan, danau, kerangka tata air, jembatan, pasar, kantor air bersih, kerangka rembesan, sumur dan pondasi lainnya (DJPb, 2022).

Sebagian besar gaji kota berasal dari cadangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke kota-kota. Dipercaya jika bantuan pemerintah daerah kota akan meningkat dengan bantuan gaji ini. Pemerintah kota seharusnya dapat menangani subsidi kota ini selaras pada batasan hukum karena kehadiran aset kota tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru dalam organisasi. Dewan juga harus fokus pada kepentingan daerah setempat dan bersikap terbuka serta bertanggung jawab (Ferina & Lubis, 2016).

Menurut penuturan salah seorang warga desa Purwosari Kecamatan Natar, Masih banyak masyarakat yang belum memahami krusialnya tanggung jawab pada penanganan aset kota, dan kerjasama daerah masih minim karena daerah tidak sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan

cadangan kota sejak mereka masih kecil. dianggap tidak memahami metodologi pengawasan cagar kota. Hal ini penting untuk dilaksanakan sehingga pemerintah kota dapat mempercayakan peningkatan cara memperkenalkan lembar data yang dapat dimanfaatkan secara efektif. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat dapat mengetahui pengelolaan keuangan kota tersebut. Sementara yang terjadi di Kota Purwosari, Lokal Natar, ada pemuatan data namun hanya sekedar konvensi dan data yang disampaikan merupakan informasi lama dan tidak disegarkan.

Hasil penelitian Nor Hasanah (2022), Moudiana Fahisa dan Mayar Afriyenti (2023) dan Riady Al Fajri (2022), mendapati jika keterusterangan mempengaruhi administrasi cagar alam kota. Sementara itu, hasil penelitian Sukmawati (2019) mendapati jika keterusterangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan kota.

Hasil penelitian Nor Hasanah (2022), Arik Susbiyani, dkk (2023), Moudiana Fahisa dan Mayar (2023) dan Alzahra Berlian Nurfitri dan Dyah Ratnawati (2023), mendapati jika tanggung jawab berdampak pada administrasi cagar kota. Kemudian lagi, hasil pemeriksaan Fahri (2020) mendapati jika tanggung jawab berdampak pada pengurus toko kota.

Hasil penelitian Asmaul Husnah dan Sri Rahayu (2023), Alya Fitri Shagita dan Rini Indriani (2024) dan Nabilla dan Desitama (2023), mendapati jika investasi area lokal berdampak pada dewan toko kota. Kemudian lagi (Ultafiah, 2017), mendapati jika dukungan daerah setempat sangat mempengaruhi para eksekutif toko kota.

Mengingat akibat survei eksplorasi masa lalu di atas, terlihat adanya lubang pemeriksaan akibat hasil pemeriksaan yang bertentangan. Jika pengelolaan aset publik umumnya tidak dipengaruhi oleh keterusterangan, tanggung jawab, dan kerja sama daerah. Maka darinya, para ilmuwan tertarik untuk mengarahkan eksplorasi kembali terhadap pengelola toko kota di Kota Purwosari, Daerah Natar, Rezim Lampung Selatan yang bertajuk “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kontribusi Warga Terhadap Penanganan Biaya Desa (Studi Kasus pada Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah upaya terarah yang dilakukan oleh organisasi pemerintah yang sepenuhnya berniat bekerja sama dengan masyarakat dalam hal data, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, keterusterangan memainkan peranan penting dengan menjamin akses yang layak atas data yang bisa diandalkan. Hal ini memungkinkan masyarakat pada umumnya guna menguraikan langkah-langkah yang diprakarsai oleh yayasan, kemudian bekerja dengan pemahaman yang jelas tentang masalah ini dan benar-benar melihat kebenarannya (Purwanti. U, 2021).

2. Indikator Transparansi

Dalam menjalankan keterbukaan ini, maknanya pemerintah wajib menyampaikan semua data penanganan biaya kota ke daerah secara transparan. Petunjuk untuk memperkirakan keterusterangan adalah (Napitupulu et al., 2020):

- a. Tersedia untuk proses pelanggaran publik.
- b. Teknik dan pedoman bantuan langsung yang mudah dipahami klien.
- c. Bantuan langsung untuk mempermudah mendapatkan data.

3. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas (Accountability) ialah komitmen guna menyampaikan tanggung jawab atau balasan, dan mengartikan pameran dan kegiatan yang merupakan substansi, perintis atau perkumpulan yang halal kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kuasa untuk

meminta data atau tanggung jawab (Syamsuddin et al., 2022). Akuntabilitas yakni komitmen pemegang amanah memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkap berbagai kegiatan dan kegiatan yang menjadi komitmennya kepada pihak yang memungkinkan amanah yang meminta kewajiban tersebut. (Lilis & Cecep, 2020).

4. **Pengertian Kontribusi warga**

Secara fonetis minat berasal dari bahasa Inggris khususnya (kerja sama) yang mengandung arti mendukung. Sedangkan dari segi pengertian dukungan adalah kerja atau kerja sama daerah setempat, lebih spesifiknya sumbangan atau kepentingan daerah setempat yang sedang dikembangkan, mengingat latihan-latihan penyusunan dan pelaksanaan program-program latihan yang dilakukan oleh daerah setempat (Solekhan , 2012).

5. **Indikator Keberhasilan Partisipasi**

Ada beberapa penanda yang dipakai guna mengukur komitmen penghuni dalam menangani biaya kota, antara lain (Sugista, 2017):

- a. Kontribusi daerah dalam mengantisipasi penanganan biaya kota.
- b. Perkumpulan daerah dalam pelaksanaan pengurusan biaya kota.
- c. Asosiasi daerah dalam mengamati dan menilai hasil.
- d. Asosiasi daerah setempat dalam pengakuan program dan penggunaan hasilnya.

6. **Pengertian Pengelolaan Dana**

Mengurus anggaran daerah merupakan bagian pengelolaan keuangan daerah yang tidak bisa dibedakan dalam APBDDes. Mengurus biaya kota merupakan suatu gerakan umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian dan kewajiban keuangan kota. Pasal 1 Undang-undang tidak resmi Nomor 60 Tahun 2014 terkait cadangan kota yang diperoleh dari APBN mengatur jika cadangan kota adalah cadangan yang diperoleh dari APBN yang direncanakan untuk kota yang dipindahkan melalui APBD daerah atau kota dan dipakai guna mendanai organisasi pemerintahan, pelaksanaan perbaikan, daerah setempat. kemajuan dan penguatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

1. **Jenis Data**

Data kuantitatif yakni informasi kajian dalam pandangan penalaran post positivisme, dipakai guna mengeksplorasi kondisi butir normal, (bukan tes) dimana analisis yakni instrumen kuncinya, metode pengumpulan data dilengkapi dengan triangulasi (campuran), (Sugiyono, 2018). Pemeriksaan informasi bersifat kuantitatif, dan hasil eksplorasi kuantitatif menekankan makna, bukan spekulasi. Jenis informasi yang digunakan bersifat kuantitatif.

2. **Sumber Data**

Yakni subjek yang menjadi asal eksplorasi ini diperoleh dari anggapan, cara pandang, perjumpaan dan kualitas para saksi yang menjadi subjek pemeriksaan (V. Wiratna Sujarweni, 2018).

Informasi yang dipakai pada kajian ini merupakan data krusial sebagai jajak pendapat dalam menghimpun data, sumber data adalah informan, khususnya orang yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan, baik tertulis maupun lisan kepada setiap saksi melalui survei dengan sumber.

3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah suatu perkumpulan, peristiwa-peristiwa dan hal-hal yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Populasi yang dimanfaatkan dalam eksplorasi ini yakni semua perangkat, pejabat tim penanganan biaya desa dan beberapa masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 35 orang dan sampel penelitian ini sebesar 35 orang.

4. Uji Asumsi Klasik**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas menyiratkan pengujian apakah dalam model berulang, faktor-faktor yang membingungkan atau elemen-elemen lainnya mempunyai penyebaran yang lazim. Sebagaimana diketahui, uji t dan uji f mengantisipasi kelebihan skor harus mengikuti standar yang ditetapkan. Uji kewajaran yang akan diselesaikan dalam eksplorasi ini menggunakan pengujian faktual.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas intinya adalah guna menilai jika model relaps melacak kaitan pada faktor bebasnya. Guna menilai multikolinieritas dengan melihat nilai VIF setiap elemen bebas. Untuk melihat adanya multikolinieritas pada model relaps cenderung dilihat dari nilai *Fluktuasi Expansion Factor* (VIF). Harga Perlawanan menimbang fluktuasi variabel otonom yang dipilih yang tidak dapat dipahami oleh faktor bebas lainnya (Ghozali, 2018).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berencana menguji jika pada model relaps ada disparitas perbandingan antara sisa persepsi yang satu dengan persepsi yang lain. Akibat dari adanya heteroskedastisitas pada model relaps adalah penilai relaps yang diperoleh menjadi mubazir, baik pada contoh yang kecil maupun yang begitu besar. Contoh cara yang bisa dipakai guna melihat apakah terdapat efek samping heteroskedastisitas adalah dengan melihat diagram Disipasi Plot (Ghozali, 2018).

5. Uji Validitas

Validitas yaitu skala yang tujuan akhirnya dibuat dilandasi skor sesuai angka yang pantas. Uji legitimasi ini memakai *All out Connection (Adjusted Thing)*, pengujian ini dengan mengasosiasikan setiap skor benda dengan skor mutlak dan merevisi nilai koefisien hubungan yang salah menilai. Pengujian tersebut memanfaatkan sisi yang berbeda dengan tingkat kepentingan 0,05.

6. Uji Reliabilitas

Pengujian ini memakai teknik pengukuran Cronbach Alpha pada skor 0,06. Apabila Cronbach Alpha suatu faktor $\geq 0,6$ maka pertanyaan pada instrumen ujian bisa diandalkan, sebaliknya bila skor Cronbach Alpha $< 0,6$ jadi pertanyaan tersebut tidak solid.

7. Analisis Regresi Linier Berganda

Eksplorasi ini menggunakan pengujian straight relapse yang berbeda karena unsur-unsur otonom dalam eksplorasi ini terdiri dari beberapa faktor. Resep pemeriksaan kambuh langsung yang digunakan adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

a : Konstanta

β : Koefisien regresi

e : Error estimated

- Y : Penanganan biaya desa
 X1 : Transparansi
 X2 : Akuntabilitas
 X3 : Kontribusi warga

Besarnya nilai konsisten pada model relaps ini tercermin pada α , sementara besarnya koefisien relaps setiap variabel diperlihatkan oleh β_1 , β_2 , β_3 . Sebelum menguji kemungkinan model relaps ini, sebaiknya pemeriksaannya melakukan tes anggapan tradisional terlebih dahulu. Seperti yang telah dipahami, uji anggapan gaya lama pada eksplorasi ini diselesaikan memakai uji biasanitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

8. Uji t (Uji Parsial)

Uji t dipakai guna melihat apakah faktor bebas (X) berdampak nyata terhadap faktor dependen (Y). Pengujian selesai dengan tingkat kepentingan 0,025. Apabila nilai kepentingannya $<0,025$ maka asumsi yang diajukan dalam eksplorasi ini diakui atau H_a diakui dan H_0 ditolak. Sebaliknya jika nilai kepentingannya $> 0,025$ maka spekulasi yang diajukan pada pengujian ini ditolak atau pada akhirnya H_a ditolak dan H_0 diakui.

9. Uji F

Uji F dipakai guna melihat apakah setiap faktor bebas (X) pada saat yang sama secara esensial mempengaruhi faktor dependen (Y). Pengujian selesai dengan tingkat kepentingan 0,05. Apabila nilai kepentingannya $<0,05$ jadi spekulasi yang diajukan pada eksplorasi ini diakui atau H_a diakui seluruhnya dan H_0 ditolak.

10. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi dipakai guna meninjau seberapa faktor gabungan faktor-faktor bebas dapat memberikan klarifikasi terhadap faktor dependen dimana skor r^2 berubah dari 0 menjadi 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin menonjol skor r^2 , jadi makin menonjol pula variasi faktor dependen yang dapat dipahami dari variasi faktor bebas. Selain itu, dengan asumsi R^2 kecil, jadi makin kecil variasi dalam faktor dependen yang bisa dipahami oleh faktor bebas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Adapun hasil analisis data adalah sebagai berikut:

1. Hasil Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Indikator	r_{hitung}		r_{tabel}		Keterangan
		N=20	N=35	N=20	N=35	
Transparansi (X1)	Item 1	0,944	0,873	0,422	0,324	Akurat
	Item2	0,853	0,809	0,422	0,324	Akurat
	Item 3	0,970	0,714	0,422	0,324	Akurat
	Item 4	0,810	0,777	0,422	0,324	Akurat
	Item 5	0,755	0,457	0,422	0,324	Akurat
Akuntabilitas (X2)	Item 1	0,597	0,805	0,422	0,324	Akurat

Variabel	Indikator	r_{hitung}		r_{tabel}		Keterangan
		N=20	N=35	N=20	N=35	
	Item 2	0,803	0,714	0,422	0,324	Akurat
	Item 3	0,619	0,777	0,422	0,324	Akurat
	Item 4	0,803	0,392	0,422	0,324	Akurat
	Item 5	0,769	0,647	0,422	0,324	Akurat
	Item 1	0,797	0,811	0,422	0,324	Akurat
Kontribusi warga (X3)	Item 2	0,686	0,519	0,422	0,324	Akurat
	Item 3	0,768	0,694	0,422	0,324	Akurat
	Item 4	0,831	0,747	0,422	0,324	Akurat
	Item 5	0,485	0,564	0,422	0,324	Akurat
	Item 1	0,873	0,724	0,422	0,324	Akurat
Penanganan biaya desa (Y)	Item 2	0,870	0,652	0,422	0,324	Akurat
	Item 3	0,857	0,778	0,422	0,324	Akurat
	Item 4	0,818	0,493	0,422	0,324	Akurat
	Item 5	0,688	0,473	0,422	0,324	Akurat

Sumber : Hasil olah data IBM SPSS 25

Melihat tabel 1, bisa diinterpretasikan jika seluruh pertanyaan yang dipakai guna menilai faktor Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Kontribusi warga (X3) dan Penanganan biaya desa (Y) pada desa Purwosari Kecamatan Natar dapat dikatakan valid atau sah dikarenakan skor $r_{hitung} > r_{tabel}$.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Rhitung		Cronbach's alpha	Keterangan
	N=20	N=35		
Transparansi (X1)	0,917	0,785	0,60	Reliable
Akuntabilitas (X2)	0,697	0,697	0,60	Reliable
Kontribusi warga (X3)	0,765	0,690	0,60	Reliable
Penanganan biaya desa (Y)	0,877	0,626	0,60	Reliable

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 25

Melihat tabel 2, maka bisa diungkapkan jika hasil uji kualitas tetap terhadap insentif Cronbach's alpha untuk tiap faktor memperlihatkan angka $> 0,60$, hingganya cenderung diasumsikan jika setiap variabel dinyatakan telah selesai penilaian ketergantungannya atau dapat diandalkan.

3. Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
	Transparansi	Akuntabilitas	Kontribusi warga	Pengelolaan Dana Desa
N	35	35	35	35

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Transparansi	Akuntabilitas	Kontribusi warga	Pengelolaan Dana Desa
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	82.9714	82.1714	84.9143	86.8571
	Std. Deviation	10.32839	11.73603	10.13257	10.38422
Most Extreme Differences	Absolute	.140	.113	.134	.147
	Positive	.104	.086	.099	.103
	Negative	-.140	-.113	-.134	-.147
Test Statistic		.140	.113	.134	.147
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082 ^c	.200 ^{c,d}	.115 ^c	.054 ^c
a. Test distribution is Normal.					
b. Calculated from data.					
c. Lilliefos Significanc Corrections.					
d. This is a lowyer bound of the true significanc.					

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 25

Dari data diatas diketahui variabel transparansi dengan skor Asymp. Sig. (2-tailed) $0,082 > 0,05$ hingganya data tersalurkan wajarl. Variable akuntabilitas $0,200 > 0,05$. Variabel kontribusi warga $0,115 > 0,05$ dan faktor penanganan biaya desa $0,054 > 0,050$ maka variabel tersebut tersalurkan wajar.

4. Hasil Uji Multikolinieritas

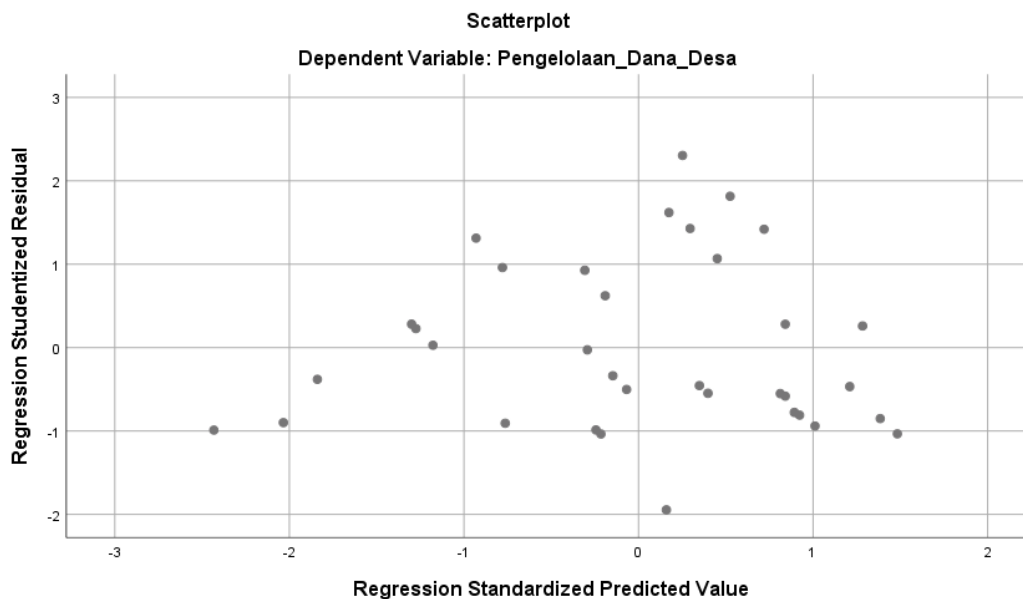
Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Transparansi	.339	2.950
Akuntabilitas	.679	1.472
Partisipasi Masyarakat	.317	3.154

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 25

Tolerance guna faktor keterusterangan yakni $0,339$, tanggung jawab yakni $0,679$, dan komitmen warga yakni $0,317$ sehingga hasilnya $> 0,10$. Untuk sementara VIF dan insentif pada variabel Keterusterangan yakni $2,950$, Tanggung Jawab yakni $1,472$, dan Komitmen Penduduk yakni $3,154$ sehingga hasilnya < 10 . Sehingga sangat beralasan jika pada uji multikolinieritas tidak terdapat efek samping multikolinieritas pada model relapse.

5. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Tidak ada fokus yang menyusun contoh umum tertentu, dan fokus pada diagram sebar di atas tersebar sembarangan di atas atau di bawah angka 0 pada y-hub. Hal ini bertujuan agar tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas.

6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.942	7.433		.665	.511
	Transparansi	.397	.136	.395	2.915	.007
	Akuntabilitas	.057	.085	.065	.675	.505
	Kontribusi warga	.521	.144	.509	3.631	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Des

Sumber : Hasil olah data IBM SPSS 25

Melihat tabel di atas di dapat koefisien bagi faktor bebas $X_1 = 0,397$, $X_2 = 0,057$, $X_3 = 0,521$ dan a menjadi konstanta yakni 4,942 sehingga model regresi yang didapat yakni:

$$Y = 4,942 + 0,397X_1 + 0,057X_2 + 0,521X_3$$

Dari sekian banyak kondisi kambing langsung di atas, pilihan berikut bisa diuraikan dan diambil:

- Konstanta yakni 4,942 menyebutkan jika faktor independen nilainya adalah 0 (nol), jadi Penanganan biaya desa 4,942.
- Koefisien regresi Transparansi (X_1) yakni 0,397 menyebutkan jika variabel Transparansi terjadi peningkatan yakni 1% maka Penanganan biaya desa bisa naik yakni 0,397.

- c. Koefisien regresi Akuntabilitas (X2) yakni 0,057 menyebutkan jika variabel Akuntabilitas terjadi peningkatan yakni 1% maka Penanganan biaya desa akan naik yakni 0,057.
- d. Koefisien regresi Kontribusi warga (X3) yakni 0,521 menyebutkan jika variabel Kontribusi warga terjadi peningkatan yakni 1% maka Penanganan biaya desa bisa naik yakni 0,521.

7. Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 6. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.942	7.433		.665	.511
	Transparansi	.397	.136	.395	2.915	.007
	Akuntabilitas	.057	.085	.065	.675	.505
	Kontribusi warga	.521	.144	.509	3.631	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa

Sumber : Hasil olah data IBM SPSS 25

Dari tabel 6, alasan adanya arah independen adalah konsekuensi dari uji t, khususnya dengan membedakan kualitas t dan t tabel yang ditentukan. T tabel tersebut bisa dicari dengan mencari tingkat peluang ($df = n - k - 1 = 35 - 4 - 1 = 30$). Jadi skor t tabel adalah 2,042. Tingkat kepentingan yang dipakai pada eksplorasi ini ialah 0,025. Melihat tabel di atas terlihat jika pengaruh setengah variabel otonom terhadap variabel dependen yakni:

- a. Skor t yang ditentukan insentif untuk variabel keterusterangan (X1) adalah yakni 2,915. Skor t determinasi $>$ t tabel yakni $2,915 > 2,042$ dan skor kepentingan yakni $0,007 < 0,025$. Hal ini memperlihatkan jika variabel keterusterangan (X1) berdampak pada variabel dependen atau biaya kota.
- b. Skor t yang ditentukan insentif pada variabel tanggung jawab (X2) adalah yakni 0,675. Skor t determinasi $<$ t tabel yakni $0,675 < 2,042$ dan nilai kepentingan yakni $0,505 > 0,025$. Hal ini memperlihatkan jika variabel tanggung jawab (X2) tidak berdampak pada variabel dependen atau biaya kota.
- c. Skor t yang ditentukan insentif pada variabel kerjasama daerah (X3) yakni 3,631. Skor t determinasi $>$ t tabel yakni $3,631 > 2,042$ dan nilai kepentingan yakni $0,001 < 0,025$. Hal ini memperlihatkan jika variabel minat daerah setempat (X3) berdampak pada variabel dependen atau biaya mengurus kota.

8. Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 7. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2958.841	3	986.280	43.219	.000 ^b
	Residual	707.444	31	22.821		
	Total	3666.286	34			

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi_Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber : Hasil olah data IBM SPSS 25

Skor F_{hitung} yakni 43,219 $F_{tabel} = 2,911$ ($43,219 > 2,911$) pada skor kepentingan 0,000 $< 0,05$. Maka darinya, model relaps dapat dipakai guna meramalkan biaya pengobatan kota. Secara keseluruhan, Tanggung Jawab, Keterusterangan, dan Dukungan Daerah bersama-sama mempengaruhi penanganan biaya kota. Dengan tingkat kepastian 95% bisa diungkpkan jika dengan asumsi H_0 ditolak dan terbukti jika secara bersama-sama faktor-faktor bebas pada dasarnya mempengaruhi variabel dependen sehingga terdapat dampak sinkron dari keterusterangan (X1), tanggung jawab (X2) dan kepentingan daerah setempat (X3) terhadap biaya mengurus kota (Y).

9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.898 ^a	.807	.788	4.77711
a. Predictors: (Constant), Partisipasi_Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi				
b. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa				

Sumber : Hasil olah data IBM SPSS 25

Dari tabel 8 diketahui jika besar koefisien korelasi ialah yakni 0.807. Koefisien determinasi R Square transparansi, akuntabilitas, kontribusi warga dalam menjelaskan atau memprediksi penanganan biaya desa yakni 80%. Sementara itu, sisanya (- 80% = 20%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kondisi relaps atau faktor-faktor yang tidak dianalisis dalam pemeriksaan ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Transparansi (X1) pada Penanganan biaya desa (Y) di Desa Purwosari Kecamatan Natar

Pengajuan hipotesis pertama (H_1) diadakan dalam pemeriksaan ini, keterusterangan (X1) dianggap penting bagi para eksekutif Aset Kota. Berdasarkan hasil pengujian dari uji T, ternyata skor thitung yakni 2,915 dan T_{tabel} 2,042, nilai ini memperlihatkan jika spekulasi dalam ulasan ini adalah OK, karena skor thitung lebih menonjol daripada T_{tabel} . bernilai. Selain itu, besarnya nilai keterusterangan adalah $0,007 < 0,025$, artinya nilai penting suatu faktor tidak bisa $> 0,025$. Dari pengujian di atas, dari tinjauan memperlihatkan jika keterusterangan ialah suatu keharusan yang mesti diadakan pemerintah kota dalam mengawasi kawasan cagar alam kota. Hal ini diperkuat dengan banyaknya tanggapan informan yang menjawab setuju dan tegas menyetujui setiap alamat yang diberikan.

2. Pengaruh Akuntabilitas (X2) pada Penanganan biaya desa (Y) di Desa Purwosari Kecamatan Natar

Mengingat pengujian dan pengujian spekulasi di atas, variabel Tanggung Jawab tidak penting bagi Dewan Aset Kota. Berdasarkan uji spekulasi diperoleh Thitung yakni 0,675 dan T_{tabel} yakni 2,042. Nilai ini memperlihatkan jika spekulasi dalam riset ini tidak dapat disangkal, karena skor thitung lebih kecil daripada skor t_{tabel} . Selain itu, nilai kritis tanggung jawab yakni $0,505 > 0,025$, artinya nilai yang sangat besar ini tidak bisa diakui sebab skor pentingnya suatu variabel tidak boleh $> 0,025$.

3. Pengaruh Kontribusi Warga (X3) pada Penanganan biaya desa (Y) di Desa Purwosari Kecamatan Natar

Pengajuan hipotesis pertama (H_1) Apa yang dilakukan dalam eksplorasi ini adalah

jika Dukungan Wilayah Lokal diperkirakan berdampak pada Dewan Aset Kota. Berdasarkan hasil pengujian uji T, ternyata skor thitung yakni 3,631 dan Ttabel 2,042, nilai ini memperlihatkan jika spekulasi dalam eksplorasi ini cukup baik, karena skor thitung lebih menonjol daripada Ttabel. bernilai. Selain itu besarnya nilai investasi daerah adalah $0,001 < 0,025$ yang berarti nilai kepentingannya cukup baik karena nilai kepentingan suatu faktor tidak boleh lebih dari 0,025.

4. Pengaruh Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Kontribusi warga (X3) pada Penanganan biaya desa (Y) di Desa Purwosari Kecamatan Natar

Mengingat konsekuensi dari uji spekulasi keempat, hal ini memperlihatkan jika keterusterangan, tanggung jawab dan dukungan daerah mempengaruhi dewan toko kota, dan itu berarti jika H4 diakui dan H0 diberhentikan. Pembuktiannya terlihat dari kondisi garis relaps yakni : $Y = 4,942 + 0,397X1 + 0,057X2 + 0,521X3$ yang berarti faktor Keterusterangan (X1), Tanggung Jawab (X2) dan Kepentingan Daerah (X3) mempunyai pengaruh yang sangat besar. sekaligus pada variabel Administrasi Aset Kota (Y). Berdasarkan akibat dari kondisi relaps, cenderung terlihat jika kaitan pada Keterusterangan (X1), Tanggung Jawab (X2), Dukungan Kelompok Masyarakat (X3), dan Aset Kota Dewan (Y) merupakan ikatan yang baik atau semuanya dalam semua kaitan searah. Dari hasil yang didapat Uji F Sinkron, khususnya nilai efek samping $0,000 < 0,05$, maka darinya spekulasi keempat diakui. Jadi bisa beralasan jika H4 diakui dan H0 ditolak, dan itu berarti jika tanggung jawab, keterusterangan, dan kerjasama daerah mempengaruhi Aset Kota Para eksekutif.

KESIMPULAN

Mengingat dampak eksplorasi yang sudah dipaparkan pada bagian terdahulu, khususnya sehubungan dengan Dampak Keterusterangan, Tanggung Jawab dan Kerjasama Daerah terhadap Aset Kota Dewan di Kota Purwosari, Kawasan Natar, cenderung beralasan jika:

1. Konsekuensi uji pecahan (uji t) memperlihatkan jika variabel keterusterangan berdampak pada dewan toko kota. Hal ini diperlihatkan pada skor yang sangat besar yaitu $0,007 < 0,025$ dan skor thitung lebih besar dari ttabel yaitu $2,915 > 2,042$.
2. Konsekuensi uji tidak lengkap (uji t) memperlihatkan jika variabel tanggung jawab berpengaruh buruk terhadap eksekutif toko kota. Hal ini diperlihatkan pada skor yang sangat besar yaitu $0,505 > 0,025$ dan skor thitung lebih kecil daripada ttabel yaitu $0,675 < 2,042$.
3. Konsekuensi uji tidak lengkap (uji t) memperlihatkan jika variabel kerjasama area lokal berdampak pada dewan toko kota. Hal ini diperlihatkan pada skor kritis yakni $0,001 < 0,025$ dan skor thitung lebih besar dari ttabel yaitu $3,631 > 2,042$.

DAFTAR REFERENSI

- DJPb, R. (2022). Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022. *DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI*.
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap *Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar*. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Ferina, I. S., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi

-
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 14.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lilis, S. N., & Cecep, T. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2).
- Napitupulu, D., Lubis, M. R., Revida, E., Hendra, S., Putra, S. S., Edi Surya Negara, A., & Simarmata, J. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi Dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Influence, Transparency, Accountability, and Community Participation on Village Fund Allocation Management (Case Study in the Village in Nganjuk District, Nganjuk District). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(1), 678–688. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2572>
- Purwanti. U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Shagita, A. F., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap *Pengelolaan Dana Desa* (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2547–2562. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i>
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*.
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi: (Bandar Lampung: Universitas Lampung)*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., dan, & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal of Management*, 5(2).
- V. Wiratna Sujarweni. (2018). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.